

Belum Semua Taman di Kota Bogor Dijaga Park Ranger

BOGOR (IM)- Taman-taman di Kota Bogor yang kerap dijadikan tempat tawuran pelajar menjadi sorotan, salah satunya Taman Palupuh di Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara. Oleh karena itu, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor siap untuk menambah park ranger dan sarana prasarana taman demi memaksimalkan penjagaan. Kadisperumkim Kota Bogor, Juniarti Estiningsih mengatakan, park ranger yang ada di taman-taman Kota Bogor saat ini bertugas menjaga taman. Untuk keamanan, pihaknya bersinergi dengan TNI-Polri dan Satpol PP.

Esti menyebutkan, dari 16 taman yang ada di Kota Bogor, hanya tujuh di antaranya yang dijaga oleh total 78 park ranger. Tujuh taman tersebut, tidak termasuk Taman Palupuh. “Sebenarnya Palupuh sendiri bukan favorit untuk nongkrong-nongkrong. Karena favorit nongkrong itu Sempur, dalam kota. Tugas kami park ranger ini kita posisikan menjaga keamanan dan ketertiban dalam penggunaan taman dan sekitarnya,” ujar Esti, Kamis (14/10).

Lebih lanjut, Esti mengatakan, kejadian ditikamnya pelajar SMAN 7 Bogor pada Rabu (6/10) lalu, tidak terjadi di Taman Palupuh. Dia pun belum mendapat laporan, taman mana saja yang kerap dijadikan tempat berkumpul atau nongkrong para pelajar. Kendati demikian, dia mengatakan, di Disperumkim Kota Bogor terdapat pengawas, dan tim komando yang mengkoordinasikan pengawasan di ta-

man-taman. “Cuma kan kembali lagi, park ranger tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban dan sarana prasarana yang ada di taman,” tuturnya.

Di samping itu, dia mengaku siap jika harus menambah park ranger di taman-taman tersebut. Namun, hal itu harus dipetakan agar sesuai dengan kebutuhan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menggaji mereka.

Dengan adanya penambahan park ranger, Esti mengatakan, justru tugas park ranger yang ada saat ini akan menjadi lebih ringan. Dia pun menjadi lebih mudah mengatur shift pergantian kerja dari para park ranger. Sekaligus untuk memaksimalkan penjagaan di taman-taman yang memang pelu park ranger.

Terpisah, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengaku akan mengevaluasi penjagaan di Taman Palupuh. Dengan melibatkan pemerintahan wilayah, dan dikoordinasikan dengan park ranger dan Satpol PP Kota Bogor. “Kita akan koordinasikan lagi. Mungkin perlu penerangan, perlu CCTV, dan lain-lain. Kita akan evaluasi semuanya,” ujarnya.

MAYORITAS PEREMPUAN

Ribuan Warga Kota Bandung Terjerat Rentenir dan Pinjol

BANDUNG (IM)- Kepala Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi Kota Bandung, Atet Dendi Hadiman mengatakan, sebanyak 7.321 orang terjerat rentenir dan pinjol ilegal. “Data ini kita dapat dari 2018 sampai 2021, ada 7.321 warga Kota Bandung terjerat rentenir di mana 4.000 warga mengakses pinjol ilegal,” kata Atet di Balai Kota, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Kamis (14/10).

Mereka yang terjerat rentenir dan pinjol menggunakan dana pinjaman untuk biaya sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan sebagian kecil untuk keperluan konsumtif. “Kebanyakan untuk usaha dan sehari-hari. Rentenir yang berkedok koperasi mayoritas berasal dari luar Kota Bandung. Sedangkan para pelaku rentenir merupakan perseorangan, dan rentenir yang berkedok koperasi,” ucapnya.

Atet menyebut, praktik rentenir maupun pinjol ilegal seringkali berujung kepada pemerasan. Mayoritas rentenir dan pinjol ilegal itu menepatkan bunga dari 10 hingga 30 persen. Untuk itu, Satgas Anti Rentenir melakukan advokasi terhadap warga yang menjadi korban rentenir dan pinjol ilegal. Selain itu, warga yang menjadi korban untuk diberikan program bantuan dari

dinas terkait. “Misal untuk pendidikan, kita dorong akses ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung. Apakah ada program untuk mereka atau di Dinas Kesehatan (Dinkes) dan lainnya,” ujar dia.

Sementara itu, Bidang Mediasi dan Advokasi Satgas Rentenir, Ricky Frediansyah mengatakan rata-rata rentenir dan pinjol ilegal mengambil bunga dari dana pinjaman yang diberikan sebesar 30 persen.

Pihaknya mengaku menemukan terdapat seorang warga yang terjebak dalam tiga transaksi rentenir. Akibat masalah tersebut, banyak warga yang terlibat masalah perceraian, kekerasan dalam rumah tangga. “Bahkan terdapat warga yang memilih untuk bunuh diri akibat tertekan oleh rentenir,” kata Ricky.

Menurutnya, warga yang terjebak dalam tiga transaksi rentenir, yaitu rentenir akan memberitahu kepada rekan rentenir lainnya saat warga yang meminjam uang tidak bisa membayar. Selanjutnya, rentenir yang diberitahu tersebut akan menawarkan dana agar bisa melunasi uang yang dipinjam dari rentenir lainnya. “80 persen korban rentenir dan pinjol ilegal yaitu perempuan,” ucapnya. ● **pur**

IDN/ANTARA



INOVASI PERKEBUNAN DI PERUMAHAN

Warga merawat sayuran di perkebunan pekarangan perumahan yang sudah terintegrasi dengan panel surya di Perumahan De Markesh, Derwati, Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/10). Warga di perumahan tersebut berinisiatif untuk melakukan inovasi cara berkebun di pekarangan dengan menggunakan panel surya untuk sistem pengairan dan pencahayaan guna mewujudkan perkebunan ramah lingkungan.

Sandiaga Ingin Desa Cikakak Jadi Destinasi Kelas Dunia

BANYUMAS (IM)- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menginginkan Desa Wisata Cikakak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menjadi destinasi berkelas dunia. “Keberpihakan kita dengan program andalan desa wisata untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat, terbukanya lapangan kerja, dan transformasi Desa Wisata Cikakak menjadi destinasi berkelas nasional, internasional, mungkin juga destinasi berkelas dunia,” kata Menparekraf SandiagaUno saat mengunjungi Desa Wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas.

Menurut dia, Desa Wisata Cikakak memiliki fenomena yang sama dengan Sangheh, Bali, dan memiliki beberapa produk ekonomi kreatif yang punya potensi besar. “Seperti wajik ketek (kudapan yang terbuat dari ketela tekong khas Desa Cikakak) yang tadi kita coba. Tadi juga ada beberapa program ekonomi kreatif, batik, Ingsy Allah nanti kita kerjasamakan,” kata dia.

Hal itu, kata dia, terkait permintaan Bupati Banyumas, Achmad Husein untuk mem-

bawa investor infrastruktur. Dia mengatakan pihaknya akan melakukan riset terkait dengan keberadaan Masjid Saka Tunggal di Desa Wisata Cikakak yang konon dibangun pada tahun 1288. “Kalau betul (dibangun) 1288, ini berarti lebih tua dari Masjid Demak. Ini berarti juga menjadi destinasi wisata religi,” katanya.

Menparekraf juga mengaku para pelaku wisata dalam dua tahun terakhir tidak merasakan kunjungan wisatawan akibat adanya pandemi Covid-19. Kehadirannya disebut sebagai apresiasi kepada Bupati Banyumas atas kepemimpinannya dalam mengendalikan Covid-19. “Kita harapkan dengan Covid-19 yang semakin terkendali, wisatawan Nusantara, malah mungkin wisatawan mancanegara bisa datang ke Desa Wisata Cikakak,” kata dia.

Terkait batik, dia mengharapkan motif batik “Ngapak Cikakak” bisa jauh lebih dikenal serta menjadi souvenir untuk membuka lapangan usaha dan lapangan kerja bagi ibu-ibu anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) maupun Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). ● **pur**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

WISATAWAN MULAI BERKUNJUNG KE LOMBOK

Sejumlah wisatawan menonton atraksi Presean di Desa Wisata Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (14/10). Semenjak tren kasus COVID-19 mengalami penurunan di wilayah NTB yang pada pertengahan Oktober 2021 masuk dalam PPKM Level I, sejumlah destinasi wisata di Pulau Lombok mulai ramai dikunjungi wisatawan domestik.

TMMD RAMPUNG TEPAT WAKTU

Dandim Keluhkan Tiang Listrik di Tengah Jalan Desa Bojong

Adanya tiang listrik di tengah jalan, Bupati Bogor, Ade Yasin mengakui jajarannya sudah berkordinasi dengan PLN. Namun karena mepet waktu, tiang listrik tersebut belum dipindahkan pihak PLN.

KLAPANUNGGAL (IM)

Proyek pengerasan jalan Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal yang dikerjakan melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMMD) rampung tepat waktu.

Namun, proyek pengerasan jalan sepanjang 2.450 meter dengan lebar 7 meter itu di beberapa titik ada tiang listrik

di tengah jalan ataupun terlalu mepet dengan rumah warga.

“Proyek pengerasan jalan Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal yang tuntas kemarin, sudah tepat waktu, tepat sasaran, dan bahkan tepat jumlah karena ada yang lebarnya melebihi dari 7 meter. Namun, saya minta di program TMMMD selanjutnya Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang bisa berkordinasi dengan PLN dan bisa membebaskan lahan milik warga, hingga lebar jalan bisa maksimal,” ucap Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol (Inf) Sukur Hermanto kepada wartawan, Kamis (14/10).

Mengenai adanya tiang listrik di tengah jalan, Bupati Bogor, Ade Yasin mengakui bahkan jajarannya sudah berkordinasi dengan PLN. Namun karena mepet waktu, tiang listrik tersebut belum dipindahkan pihak PLN.

“Dinas PUPR sebelumnya sudah berkordinasi dengan PLN, namun karena hingga selesai waktu pelaksanaan pengerasan jalan ternyata pi-

hak PLN belum memindahkan, saya minta masyarakat berhati-hati hingga tiang-tiang listrik tersebut dipindahkan dari tengah ke pinggir jalan,” kata Ade Yasin.

Ia menambahkan, proyek pengerasan jalan Desa Bojong, Pemkab Bogor menyiapkan anggaran sebesar Rp2,3 miliar. Ke depan, anggarannya bisa naik ataupun turun sesuai kebutuhan.

“Mengenai anggaran proyek pengerasan jalan melalui program TMMMD ini bisa saja ditambah oleh Pemkab Bogor, jikalau memang itu kebutuhannya. Kami mengapresiasi pelaksanaan TMMMD yang tepat waktu, tepat sasaran dan bahkan tepat jumlah,”

tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kelompok Staf Ahli Kodam III Siliwangi, Brigjen TNI Agus Supriyo Winarno mengaku pihak Kodam III Siliwangi melalui Korem 061 Surya Kencana dan Kodim 0621 siap membantu Pemkab Bogor dalam pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga rumah ibadah.

“Kodam III Siliwangi dan jajaran serta dibantu Angkatan Udara dan Angkatan Laut siap membangun jalan, jembatan, merehabilitasi Rutilahu dan rumah ibadah. Baik itu melalui program TMMMD, maupun Bakti TNI,” tukasnya. ● **gio**

19 Kecamatan di Bandung Berpotensi Terdampak Gempa

BANDUNG (IM)- Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung, Jawa Barat, mencatat terdapat 19 kecamatan yang berpotensi tinggi terdampak bencana gempa. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk selalu waspada dan memahami mitigasi kebencanaan.

Kasi Mitigasi Bencana Diskar PB, Amires Pahala, mengatakan, pihaknya tengah menyusun peta risiko bencana di Kota Bandung yang diperkirakan akan selesai dalam jangka waktu dekat. Berdasarkan kajian awal, 19 kecamatan berpotensi tinggi terdampak bencana gempa.

“Kajian awal 19 kecamatan potensi tinggi (bencana gempa) sisanya sedang, Kota Bandung berpotensi terhadap bencana,” ujarnya saat acara Bandung Menjawab di Balai Kota Bandung, Kamis (14/10).

Ia menuturkan, ke-19 kecamatan tersebut berpotensi tinggi terdampak bencana gempa dari jalur Sesar Lembang. Oleh karena itu pihaknya mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan memahami tentang mitigasi bencana. “Kawasan risiko bencana dalam proses, mau tinggi atau sedang kita tetap harus waspada,” katanya. Terkait ke-19 kecamatan tersebut, Amires enggan menjelaskan lebih lanjut nama-nama kecamatan sebab

dikhawatirkan akan membuat panik masyarakat.

Ia menuturkan, pihaknya terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang mitigasi bencana melalui online. Diharapkan kesadaran masyarakat terhadap bencana lebih tinggi. “Semua bencana akan merusak yang kita harapkan walaupun tinggi tapi tingkat kesadaran tinggi sehingga tingkat kerentanan rendah,” katanya.

Kasi Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana Diskar PB Kota Bandung, Roby Darwan, mencatat terdapat 10 peristiwa bencana seperti banjir, pohon tumbang, kanopi roboh sepanjang Januari hingga Oktober. Sedangkan bencana kebakaran sebanyak 146 kejadian dan penyelamatan sebanyak 444.

“Alhamdulillah kejadian kebakaran 2 tahun terakhir berkurang karena dua tahun sekarang kebanyakan masyarakat diam di rumah,” katanya. Ia menyebut salah satu faktor penyebab kebakaran yaitu kelalaian manusia.

Ia melanjutkan, beberapa daerah rawan longsor di Kota Bandung di antaranya di Cidadap, Mandalajati, Coblong. Sedangkan banjir di Rancasari, Gedebage, Panyileukan dan sekitar wilayah perkotaan. ● **pur**

Dua Klaster Covid-19 di DIY Muncul, Warga Diminta Jangan Lengah

YOGYAKARTA (IM)- Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Huda Tri Yudianta meminta warga tetap hati-hati dan jangan lengah terhadap penularan kasus Covid-19. Pasalnya, beberapa hari belakangan muncul klaster baru penularan Covid-19, yaitu klaster Senam dan Tilik (menjenguk orang sakit).

“Saat ini kita harus tetap sangat hati-hati (penularan Covid-19). Masyarakat sepertinya sudah melupakan adanya Covid-19 sehingga keramaian dimana-mana, masker juga kadang tidak dipakai,” ujar Huda, Kamis (14/10).

Kasus Covid-19 memang diakui sudah jauh menurun. Namun, masyarakat diminta tidak abai karena kasus baru

masih muncul.

Sebelumnya, muncul dua klaster baru di Bantul, yaitu klaster senam dan tilik. Klaster senam muncul saat warga di Padukuhan Mbelan, Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Bangliwuro, mengikuti senam bersama. Sebanyak sembilan orang kemudian dinyatakan positif Covid-19. Sementara itu, klaster tilik muncul saat warga Padukuhan Gokerten, Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden menjenguk salah satu warga yang tengah sakit. Warga yang dijenguk tersebut kemudian dinyatakan positif Covid-19. Setelah dilakukan penelusuran, sembilan warga kemudian dinyatakan positif Covid-19. ● **pp**



IDN/ANTARA

PENERIMAAN PAJAK JAWA BARAT

Warga melakukan pembayaran pajak kendaraan di Samsat Masuk Desa (SAMADES) di Kelurahan Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis (14/10). Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar tercatat hingga awal Oktober 2021 pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp429 miliar yang diperoleh dari 495.926 kendaraan bermotor tersebut karena meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan melalui layanan E-Samsat serta program Triple Untung Plus.